

Judul : Sekolah Rakyat, Kopdes, dan MBG menuai pujian
Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sekolah Rakyat, Kopdes, Dan MBG Menuai Pujian

PEMERINTAHAN Prabowo Subianto berupaya menggenjot kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus kesejahteraan rakyat dengan berbagai program strategis. Program itu adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggulan Garuda.

ANGGOTA Komisi XII DPR Mukhtarudin menyebut, MBG sebagai langkah visioner memperkuat fondasi SDM sejak dini. Menurutnya, gizi yang baik di masa anak-anak merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi sehat, cerdas, dan produktif.

"Program ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan nutrisi, tapi juga menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan di banyak daerah," ujarnya, kemarin.

Mukhtarudin menekankan distribusi harus merata dan tepat sasaran, khususnya di wilayah terpencil. Sementara itu, Kopdes Merah Putih dinilainya mampu menjadi tulang punggung

ekonomi lokal. "Kopdes bukan hanya wadah ekonomi, tapi juga simbol kebersamaan dan gotong royong yang memberdayakan komunitas desa," imbuhnya.

Untuk mendukung hal itu, ia mendorong pemerintah memastikan tata kelola koperasi profesional, didukung pelatihan dan akses modal memadai.

Adapun Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda disebut sebagai jawaban atas kesenjangan kualitas pendidikan. "Sekolah Rakyat memberi akses inklusif, sementara Sekolah Unggulan Garuda menyiapkan talenta unggul sebagai motor kemajuan bangsa," jelas legislator asal Kalteng itu.



Mukhtarudin

Ia menegaskan, keberhasilan program tak semata ditentukan besar kecilnya anggaran, melainkan kualitas tata kelola, transparansi, serta pengawasan. Diharapkan ada tim pengawas lintas komisi DPR bekerja sama dengan BPK dan BPKP memantau pelaksanaan program secara

real-time.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Bertu Merlas menyoroti alokasi jumbo MBG sebesar Rp 335 triliun dari anggaran pendidikan. Dana itu akan melayani 82,9 juta siswa lewat 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Anggaran sebesar ini adalah taruhan besar Presiden Prabowo. Risiko penyelewengan tinggi, jadi harus dikawal ketat agar benar-benar tepat sasaran," tegasnya.

Menurut Bertu, pengawasan harus dilakukan dari hulu ke hilir-dari penganggaran, pengadaan bahan makanan, distribusi, hingga konsumsi di sekolah. Ia menolak jika dana raksasa ini justru jadi lahan korupsi atau dimanfaatkan kelompok tertentu.

"Jangan sampai anggaran besar, tapi masih ditemukan makanan tidak higienis atau tidak sesuai gizi. Kita tidak ingin ada kasus keracunan lagi," tandas politisi PKB itu.

Bertu bahkan mendesak audit menyeluruh atas MBG. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah wajib bertindak tegas tanpa kompromi. "Ini soal masa depan generasi bangsa. Tidak boleh ada toleransi sekecil apapun," pungkasnya. ■ TIF